Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

EVALUASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DI PASAR CANDI KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nabiha[1], Saidah Hasbiyah[2], Yusran Fahmi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: utinabiha@gmail.com

ABSTRAK

Pasar Candi merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan tawar-menawar serta transaksi jual beli. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti banyaknya pedagang yang berjualan di badan jalan dan trotoar, para pembeli juga memarkirkan kendaraannya secara sembarangan serta masih kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pihak terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil mealui penarikan informan secara purposive sampling berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Penertiban Pedagang Kaki lima (PKL) oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Sub variabel efektivitas dengan indikator hasil yang diinginkan dan indikator tujuan kurang baik. Sub variabel efisiensi dengan indikator usaha yang diperlukan kurang baik dan indikator manfaat bersih cukup baik. Pada sub variabel kecukupan, indikator pencapaan hasil dan indikator efektivitas tetap cukup baik. Sub variabel pemerataan dengan indikator manfaat merata pada kelompok cukup baik dan indikator pelayanan publik kurang baik. Sub variabel responsivitas, dengan indikator hasil kebijakan memuaskan kebutuhan sudah baik dan indikator mencakup cukup baik. Terakhir, sub variabel ketepatan dengan indikator kebijakan cukup baik dan indikator sesuai perencanaan sudah baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor pendukung terdiri dari adanya terselenggaranya penertiban sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan terlaksananya tahapan kegiatan penertipan sesuai perencanaan dan standar operasional prosedur. Faktor penghambat yaitu, kurangnya kesadaran pedagang atas peraturan yang melarang berjualan di trotoar dan badan jalan, masih adanya pedagang kaki lima yang mentaati peraturan hanya saat ada petugas, berdasarkan pertimbangan dari aspek sosial dan ekonomi dan kurangnya kesadara pembeli atas dampak kemacetan akibat parker sembarangan. Untuk meningkatkan evaluasi penertibanPedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di pasar candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara disarankan agar Satpol PP lebih intensif melakukan pengawasan dan penegakan aturan, serta diperlukan penyediaan lahan parkir dan relokasi tempat berjualan yang lebih memadai demi terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penertiban, Pasar, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Candi Market is a place where sellers and buyers meet to negotiate and conduct buying and selling transactions. However, in practice, various problems still exist, such as many vendors selling on roadways and sidewalks, buyers parking their vehicles indiscriminately, and a continued lack of supervision and monitoring from related parties. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling of 12 informants. After the data were collected, they were analyzed using techniques including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the evaluation of Street Vendor

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Enforcement by the Civil Service Police Unit and Fire Department at Candi Market, Sungai Malang Village, Amuntai Tengah Sub-district, Hulu Sungai Utara Regency, was fairly good. The effectiveness sub variable covering the desired outcome indicator and the goal indicator was rated poor. The efficiency sub variable's required effort indicator was rated poor, while its net benefit indicator was rated fairly good. For the adequacy sub variable, both the outcome achievement indicator and the sustained effectiveness indicator were rated fairly good. The equity sub variable's indicator of benefits being evenly distributed across groups was rated fairly good, while its public service indicator was rated poor. The responsiveness sub variable's indicator of policy outcomes satisfying needs was rated good, while its coverage indicator was rated fairly good. Finally, for the appropriateness sub variable, the policy indicator was rated fairly good, while the indicator of alignment with planning was rated good. To improve the evaluation of Street Vendor Enforcement by the Civil Service Police Unit and Fire Department at Candi Market, Sungai Malang Village, Amuntai Tengah Sub-district, Hulu Sungai Utara Regency, it is recommended that the Civil Service Police Unit conduct more intensive supervision and rule enforcement, and that adequate parking areas and vendor relocation sites be provided, in order to create order, comfort, and smooth traffic flow for the community.

Keyword: *Order, market, street vendors*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan yang dibahas dalam pasal 24 ayat 2 yang telah diatur secara tegas“ setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan, di atas trotoar, di atas saluran air, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan.”

Pasar pada dasarnya merupakan wadah pelayanan jual beli, dimana kedua belah pihak biasanya melakukan proses tawa-menawar hingga mencapai kesepakatan harga. Namun keterbatasan daya tampung pasar yang tak sebanding dengan jumlah pedagang yang ada kerap kali mendorong sebagian pedagang untuk berjualan di tepi jalan, yang kemudian dikenal dengan istilah Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang mempunyai usaha dan menjalankan modal dengan terbatas, terkadang hanya dapat imbalan atas jerih paahnya. Usaha ini umumnya dijalankan dengan modal usaha terbatas, terkadang hanya sebagai alat bagi pemilik modal untuk mendapatkan imbalan atas jerih payahnya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri memunculkan dua sisi yang berlawanan, secara ekonomi memberikan peluang untuk menghidupkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan sehingga menekan angka penganagguran, namun di sisi lain dimaksudkan melanggar prinsip etika dasar.

Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di area yang semestinya digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan aktivitas masyarakat umum harus didasarkan pada pemisahan fungsi ruang yang jelas dan pengelolaan yang berkeadilan. Namun halnya pedagang kaki lima di pasar candi masih banyak berjualan di badan jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan aktivitas masyarakat umum.

Pengelola pasar atau pihak terkait secara proaktif meyusun rencana pengelolaan parkir yang komprehensif serta terstruktur dengan baik untuk tujuan utama mengakomodasi kebutuhan pedagang, pembeli dan masyarakat umum. Tidak tersedianya lahan parkir di pasar candi menyebabkan para pembeli memarkirkan kendaraan secara sembarangan, hal ini terganggunya aktivitas berjualan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Pengawasan dari pihak terkait untuk menertibkan PKL dilakukan secara konsisten. Pengawasan dilakukan melalui mobil patroli secara rutin di kawasan pasar pada jam sibuk atau jam biasa untuk memastikan para PKL berjualan sesui area yang ditentukan. Namun hal itu belum dilakukan pihak terkait pedagang kembali berjualan setelah dilakukannya proses penertiban.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Evaluasi berkesinambungan dengan pengolahan informasi hasil kebijakan (Rantung, 2024). Sebuah kebijakan dikatakan memiliki nilai nyata apabila hasil yang dicapai mampu memberikan kontribusi terhadap tujuan yang elah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa kinerja kebijakan program tersebut sudah berjalan dengan bermakna, dimana permasalahan dasar kebijakan dapat diperjelas maupun diselesaikan dengan baik (Rantung, 2024). Evaluasi memiliki peran yang fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Nur, 2025). Hal ini kunci untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya berlandaskan niat yang baik tetapi juga menghasilkan dampak yang diinginkan masyarakat (Nur, 2025). Keberhasilan pelaksanaanya diukur dari tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam program (Hayat, 2018). Keberhasilan pada evaluasi proses nilai berdasarkan sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan (Nur, 2025). Tujuan evaluasi, menentukan tingkat kebijakan, mengukur efesiensi, keluaran, dampak, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan dan sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang (Nur, 2025).

Adapun fenomena-fenomena masalah dalam pembahasan saya sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pedagang yang berjualan di badan jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan aktivitas masyarakat umum.
2. Tidak tersedianya lahan parkir dan kurang tertatanya lapak pedagang sehingga para pembeli memarkirkan kendaraan secara sembarangan, hal ini menyebabkan terganggunya aktivitas berjualan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas.
3. Kurangnya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) karena pedagang masih saja berjualan di badan jalan setelah dilakukan proses penertiban.

Berlandaskan pada permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengkaji **"EVALUASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DI PASAR CANDI KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA".**

METODE

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara memeroleh data guna mencapai kegunaannya (Pasolong, 2020). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu etnis berpijak pada kondisi secara ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui Teknik triangulasi, yakni memadukan berbagai sumber dan metode agar data yang diperoleh lebih valid. sedangkan analisis datanya dengan menitikberatkan dipemaknaan dibandingkan generalisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karna mampu menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan secara rinci proses yang berlangsung dilapangan. Adapun pengumpulan data yang digunakan: *Pertama* observasi, menurut Nasution yang dikutip Sugiyono (2020:297) menjelaskan seluruh cabang ilmu pengetahuan menggunakan observasi, sebab para peneliti bekerja berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengamatn langsung dilapangan. *Kedua,* wawancara yaitu proses tanya jawab antara dua pihak atau lebih yang bertujuan menghimpun informasi yang dibutuhkan. *Ketiga,* dokumentasi yang berupa catatan tertulis, foto maupun yang dihasilkan oleh seseorang sebagai bukti pendukung data penelitian. Untuk memfokuskan dan dan menyederhanakan data hasil temuan, data kemudian disajikan secara naratif dan sistematis dengan mengacu pada teori William N Dunn. Informan terdiri atas dua belas orang, meliputi kabid pnegakan peraturan perundang-undangan daerah, kasubbag tata usaha, kasi operasi pengendalian & kerja sama, tokoh Masyarakat dan para pedagang.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Untuk melihat bagaimana Evaluasi dengan teori William Dunn (dalam Firyal Akbar, 2018:18), dengan indicator berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas menyangkut kesesuaian antara hasil yang ditargetkan dengan hasil yang benar-benar terwujud di lapangan. Kreteri ini melihat apakah suatu altenantif kebijakan berhasil mewujudkan akibat atau tujuan yang diinginkan dari dilaksanakannya suatu Tindakan yang erat kaitannya.

a. Hasil yang diinginkan

Hasil merupakan aibat akhir dari suatu rangkaian peristiwa yang dapat digambarkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa capaian yang diharapkan kurang baik hal ini terlihat dari belum terwujudnya rasa nyaman bagi para pedagang, Masyarakat, maupun pengguna jalan serta belum tegaknya pasal 24 Ayat 2 secara konsisten.

Hal ini tidak sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pelaksanaan dalam kebijakan perlu didasarkan pada enam kreteria pokok. Salah satunya Adalah efektivitas yang menitikberatkan pada perbandingan antara hasil yang direncanakan dengan capaian nyata yang berhasil diperoleh.

b. Tujuan

Tujuan berfungsi sebagai landasan perencanaan sekaligus standar evaluas, karena setiap keberhasilan suatu kebijakan akan diukur berdasarkan sejauh mana tujuan tersebut tercapai.

Dari hasil wawancara & observasi dapat disimpulkan bahwa tujuan kurang baik karena tujuan akhir belum bisa meningkatkan kedisiplinan serta kesadaran yang diterapkan oleh para pedagang itu sendiri dalam mematuhi dan mentati aturan yang telah ditetapkan, para pedagang kaki lima di pasar candi juga masih saja kembali berjualan setelah dilakukannya penertiban.

Hal ini tidak sesuai dengan teori dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) ukuran evaluasi melibatkan 6 kriteria utama, yaitu efektivitas dengan tujuan yang diharapkan.

2. Efesiensi

Efesiensi berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya, Dimana keberhasilan suatu kbijakan dilihat dari kehematan prosesnya.

a. Usaha yang diperlukan

Usaha yang diperlukan menjadi tolak ukur untuk menilai seberapa banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan pemerintah demi mewujudkan efektivitas yang telah direncanakan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Hasil wawancara dan observasi ini upaya patroli, pembinaan dan sosialisasi secara langsung dapat dikatakan kurang baik. Meskipun berbagai usaha dan strategi sudah dilaksanakan namun penertiban sudah jarang dilakukan.

Hal ini tidak sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaittu efesiensi mengacu pada anaisis perbandingan antara hasil dengan segala kebijakan yang telah ditentukan.

b. Manfaat Bersih

Manfaat bersih merupakan nilai keuntungan yang diterima oleh penerima manfaat melebihi seluruh pengorbanan.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menganai manfaat bersih sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penataan pedagang yang sudah lebih baik, namun masih ada titik kemacetan yang belum teratasi sepenuhnya.

Hal ini cukup sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaittu efesiensi mengacu pada anaisis perbandingan antara hasil dengan segala kebijakan yang telah ditentukan.

3. Kecukupan

Kecukupan menggambarkan seberapa memadai hasil suatu kebijakan dalam menjawab akar persoalan yang mendasari perumusan kebijakan itu sendiri.

a. Pencapaian Hasil

Pencapaian hasil adalah hal yang sudah dicapai selama peraturan ini berjalan. Menurut Rue & Byars dalam Harbani Pasolong (2020:244) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai Tingkat pencapaian hasil.

Dari wawancara, observasi & dokumentasi pencapaian hasil cukup baik. Petugas sudah menjalankan penertiban sesuai dengan ketentuannya. Selain itu, sebagian besar pedagang juga sudah mentaati arahan yang diberikan oleh petugas. Meskipun masih terdapat sebagian kecil pedagang yang berjualan sampai malam hari diluar jam operasional pasar.

Hal ini cukup sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaittu berkaitan dengan sejauh mana pencapaian suatu tujuan kebijakan benar-benar mampu menuntaskan akar permasalahan yang menjadi latar belakang munculnya kebijakan tersebut.

b. Efektivitas Tetap

Efektivitas dapat dimaknai sebagai Tingkat penentuan program perencanaan diawal.

Hasil wawancara dan observasi yang lakukan mengenai efektivitas tetap di Pasar Candi cukup baik. Karena terlaksana cukup efektif, dimana pedagang semakin hari semakin lebih baik dalam menata lapak dagangannya itu sendiri karena sudah diberikan arahan oleh petugas.

Hal ini cukup sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaittu Kecukupan dalam menyelesaikan masalah.

4. Pemerataan

Pemerataan dapat dipahami sebagai Upaya untuk mendistribusikan sumber daya, layanan atau kesempatan secara adil kepada seluruh Masyarakat tanpa terkecuali.

a. Manfaat Merata Pada Kelompok

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Pemerataan manfaat pada kelompok merujuk pada terpenuhinya rasa keadilan dalam pendistribusian hasil suatu kebijakan.

Hasil wawancara dan observasi ini, tentang manfaat yang merata cukup baik. Karena sebagian besar masyarakat sudah merasakan manfaat pasca penertiban, dengan begitu ada Sebagian masyarakat belum merasakan tertibnya pedagang kaki lima secara keseluruhan, pengguna jalan dan pedagang kaki lima itu sendiri.

Hal ini cukup sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Pemerataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan yang diselenggarakan.

b. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah rangkaian aktivitas yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah guna memnuhi kebutuhan dasar Masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi ini, pelayanan public kurang baik karena jalanan sempit dan pengguna jalan merasa arus lalu lintas mengalami kemacetan yang disebabkan oleh pelanggan yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan maka perlu adanya tempat parkir agar para pembeli tidak sembarangan memarkir kendaraan.

Hal ini tidak sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Pemerataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan diselenggarakan.

5. Responsivitas

Responsivitas dapat dimaknai sebagai kesigapan suatu Lembaga dalam menangkap keluhan Masyarakat.

a. Hasil Kebijakan Memuaskan Kebutuhan

Kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk arahan yang disusun oleh phak berwenang sebagai landasan dalam menentukan sikap maupun tindakan.

Hasil wawancara & observasi dapat disimpulkan sudah baik. Karena para Satpol PP berusaha melakukan penertiban sesuai dengan kebijakan dari peraturan daerah untuk menjaga kondisi agar lebih stabil.

Hal ini sudah sesuai teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Responsivitas bersangkutan dengan kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan kelompok masyarakat, pengguna lalu lintas dan pedagang kaki lima.

b. Mencakup

Mencakup dapat diartikan sebagai suatu kondisi Dimana suatu hal memuat beberapa komponen tersebut menjadi satu kesatuan dalam suatu cakupan yang lebih luas.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Dikarenakan sudah sesuai dan mencakup dalam pelaksanaannya. Dimana itu berguna untuk kenyamanan para pedagang kaki lima dan lalu lintas agar terhindar dari kemacetan.

Hal ini cukup sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Responsivitas bersangkutan dengan kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan kelompok masyarakat, pengguna lalu lintas dan pedagang kaki lima.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

6. Ketepatan

Ketepatan dapat diartikan sebagai Tingkat kesesuaian antara suatu proses, hasil maupun Keputusan dengan tujuan atau ukuran yang telah ditentukan.

a. Kebijakan

Kebijakan Publik dapat dipahami sebagai keseluruhan Keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari hasil wawancara & observasi yang peneliti lakukan cukup baik. Karena para Satpol PP melakukan kegiatan penertiban sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan Sebagian pedagang merasakan manfaatnya setelah adanya penertiban.

Hal ini cukup sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Ketepatan berkenaan dengan program kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

b. Sesuai Perencanaan

Rencana dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perumusan kegiatan yang dipersiapkan sejak awal secara cermat.

Hasil wawancara dan observasi ini mengenai pelaksanaan penertiban yang sudah sesuai dengan perencanaan nya itu sudah baik. Karena berjalan sesuai dengan perencanaan awal seperti adanya teguran yaitu pengamanan lapak pedagagng, yaitu untuk kenyamanan masyarakat termasuk kedisiplinan para pedagang kaki lima.

Hal ini sudah sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Ketepatan berkenaan dengan program kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penertiban Pedagng Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung

Dalam sebuah penelitian tentunya beberapa hal yang mendukung hasil penelitian tersebut dan ada juga faktor-faktor penghambatnya. Berikut ini akan dijelaskan tentang faktor-faktor pendukung dari Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Terselenggaranya Penertiban Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kebijakan dapat diartikan sebagai seperangkat Keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang.

Hasil wawancara dan observasi ini Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara memaparkan bahwa hasil kebijakan memuaskan kebutuhan menjadi faktor pendukung evaluasi pelaksanaan kebijakan.

b. Terlaksananya Tahapan kegiatan penertiban sesuai dengan perencanaan dan SOP yang berlaku

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Rencana dapat dipahami sebagai suatu bentuk persiapan yang dirancang secara terstruktur guna mewujudkan sasaran yang diinginkan pada masa mendatang.

Hasil wawancara dan observasi Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai pelaksanaan penertiban yang sudah sesuai dengan perencanaan nya itu sudah baik. Karena berjalan sesuai dengan perencanaan awal yaitu pengamanan lapak pedagagng, yaitu untuk kenyamanan masyarakat termasuk kedisiplinan para PKL.

2. Faktor Pengambat

Dalam sebuah penelitian tentunya ada hal yang mendukung hasil penelitian tersebut dan ada juga faktor penghambatnya. Berikut ini akan dijelaskan tentang faktor-faktor penghambat dari Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Kurangnya kesadaran pedagang atas peraturan yang melarang berjualan di troroar dan badan jalan

Adanya kendala dalam melakukan penertiban menjadi salah satu penyebab terhambatnya sebuah pelaksanaan kebijakan penertiban.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diinginkan kurang baik karena belum terciptanya kenyamanan kepada para pedagang, masyarakat dan pengendara lalu lintas.

b. Masih adanya PKL yang mentaati peraturan hanya saat ada petugas

Fenomena masih ditemukannya pedagang kaki lima yang bersikap patuh terhadap ketentuan yang berlaku hanya saat pengawasan petugas berlanggung menggambarkan bentuk kepatuhan yang tidak konsisten.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tujuannya kurang baik karena tujuan akhir belum adanya lahan untuk merelokasi para pedagang guna mengatasi sepenuhnya akan masalah kemacetan lalu lintas yang menyebabkan masyarakat sekitar maupun pengendara lalu lintas yang sedang melewati jalan tersebut merasa terganggu.

c. Berdasarkan pertimbangan dari aspek social dan ekonomi

Tinjauan yang berlandaskan pada faktor social dan ekonomi sebagai suatu pendekatan dalam menentukan kebijakan.

Hasil wawancara, observasi dapat ditarik esimpulan upaya penertiban melalui kegiatan patroli, pembinaan dan sosialisasi secara langsung dapat dikatakan kurang baik. Meskipun berbagai usaha dan strategi sudah dilaksanakan namun penertiban sudah jarang dilakukan.

d. Kurangnya kesadaran pembeli atas dampak kemacetan akibat parkir sembarangan

Minimnya pemahaman konsumen terhadap efek negatif kemacetan lalu lintas yang ditimbulkan oleh kebiasaan memarkir kendaraan di badan jalan secara tidak teratur.

Hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, pelayanan public ini kurang baik karena jalanan sempit dan pengguna jalan merasa arus lalu lintas mengalami kemacetan yang disebabkan oleh pelanggan yang memarkirkan kendaraan secara

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

sembarangan maka perlu adanya tempat parkir agar para pembeli tidak sembarangan memarkir kendaraan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti simpulkan: Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Cukup Baik. *Pertama* pada aspek Efektivitas diketahui indikator hasil yang diinginkan kurang baik karena belum terciptanya kenyamanan kepada para pedagang, masyarakat dan pengendara lalu lintas. Pada indikator tujuan kurang baik karena tujuan akhir belum bisa meningkatkan kedisiplinan serta kesadaran yang diterapkan oleh para pedagang itu sendiri dalam mematuhi dan mentaati aturan yang telah ditetapkan, para pedagang kaki lima di pasar candi juga masih saja kembali berjualan setelah dilakukannya penertiban. *Kedua* pada aspek Efisiensi diketahui indikator usaha yang diperlukan kurang baik karena meskipun berbagai usaha dan strategi sudah dilaksanakan namun penertiban jarang dilakukan. Pada indikator manfaat bersih cukup baik. Meskipun demikian, arus lalu lintas di kawasan pasar candi tersebut belum dapat dikatakan lancar sepenunya, mengingat kemacetan masih kerap terjadi. *Ketiga* pada aspek kecukupan diketahui indikator pencapaian hasil cukup baik karena petugas sudah menjalankan penertiban sesuai dengan ketentuannya. Selain itu, sebagian besar pedagang juga sudah mentaati arahan yang diberikan oleh petugas. Meskipun masih terdapat sebagian kecil pedagang yang berjualan sampai malam hari diluar jam operasional pasar. Pada indikator efektivitas tetap juga cukup baik karena terlaksana cukup efektif, dimana pedagang semakin hari semakin lebih bail dalam menata lapak dagangannya itu sendiri karena sudah diberikan arahan oleh petugas. *Keempat* pada aspek pemerataan diketahui indikator manfaat merata pada kelompok cukup baik karena masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum puas akan manfaat tertibnya pedagang kaki lima secara kesluruhan, pengguna jalan dan pkl itu sendiri. Pada indikator pelayanan publik dapat dilihat hasilnya kurang baik karena karena jalanan sempit dan pengguna jalan merasa arus lalu lintas mengalami kemacetan yang disebabkan oleh pelanggan yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan maka perlu adanya tempat parkir agar para pembeli tidak sembarangan memarkir kendaraan. *Kelima* pada aspek Responsivitas diketahui indikator hasil kebijakan memuaskan kebutuhan sudah baik karena Karena para Satpol PP sudah berusaha melakukan penertiban sejalan kebijakan dari peraturan daerah. Pada indikator mencakup hasilnya cukup baik dikarenakan sudah sesuai dan mencakup dalam pelaksanaannya. dimana itu berguna untuk kenyamanan para pedagang kaki lima dan lalu lintas agar terhindar dari kemacetan. *Keenam* pada aspek ketepatan diketahui indikator kebijakan cukup baik karena Karena para Satpol PP melakukan kegiatan penertiban sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan Sebagian pedagang merasakan manfaatnya setelah adanya penertiban. Pada indikator sesuai perencanaan hasilnya sudah baik karena berjalan sesuai dengan perencanaan awal seperti adanya berbagai teguran yaitu pengamanan lapak pedagagng, yaitu untuk kenyamanan masyarakat termasuk kedisiplinan para pedagang kaki lima. Faktor yang mempengaruhi ialah, faktor pendukung terdiri dari adanya terselenggaranya penertiban sejalan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan terlaksananya tahapan kegiatan penertipan sesuai perencanaan dan standar operasional prosedur. Faktor penghambat yaitu, kurangnya kesadaran pedagang atas peraturan yang melarang berjualan di trotoar dan badan jalan, masih adanya pedagang kaki lima yang mentaati peraturan hanya saat ada petugas, berdasarkan pertimbangan dari aspek sosial dan ekonomi dan kurangnya kesadara pembeli atas dampak kemacetan akibat parker sembarangan. Untuk

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

meningkatkan evaluasi penertibanPedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di pasar candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara disarankan agar Satpol PP lebih intensif melakukan pengawasan dan penegakan aturan, serta diperlukan penyediaan lahan parkir dan relokasi tempat berjualan yang lebih memadai demi terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 9 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Hayat. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan formulasi.* Jawa Timur: Intrans Publishing.

Nur, M. (2025). *Kebijakan Publik.* Sumatera Barat: Get Press Indonesia.

Pasolong, Harbani. 2020. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Rantung, M. I. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik.* Tondano: Tahta Media Group.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.